



STUDI KASUS KOMISI IRIGASI PROV. NTB

Evaluasi Capaian Kinerja, Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017

Tantangan Pertanian untuk Pembangunan

- Tekanan demografi yang kuat
- Meningkatnya harga input pertanian pada strategi intensifikasi yang berbasis pada pupuk kimia
- Penggunaan inovasi teknologi yang tidak diiringi oleh penelitian dan pengembangan serta penyertaan terhadap aplikasinya
- Perubahan iklim dan meningkatnya kelangkaan sumber air
- Peningkatan ekonomi yang mempengaruhi rantai pasar global sehingga menekankan pada efisiensi tenaga kerja
- Adanya kejelasan peningkatan kebijakan, institusi, dan investasi dapat menurunkan kemiskinan dari pertanian

Permasalahan produktivitas pertanian global di negara berkembang

- (i) lemahnya kelembagaan terkait petani, irigasi dan air;
- (ii) kurangnya sistem irigasi;
- (iii) pemeliharaan sistem irigasi tidak memadai;
- (iv) terbatasnya jumlah penyuluh pertanian yang terampil;
- (v) kurangnya akses petani kecil terhadap layanan keuangan;
- (vi) hambatan sertifikasi/kepemilikan tanah;
- (vii) kesenjangan teknologi pertanian; dan
- (viii) terbatasnya upaya promosi komoditas pertanian bernilai tinggi.

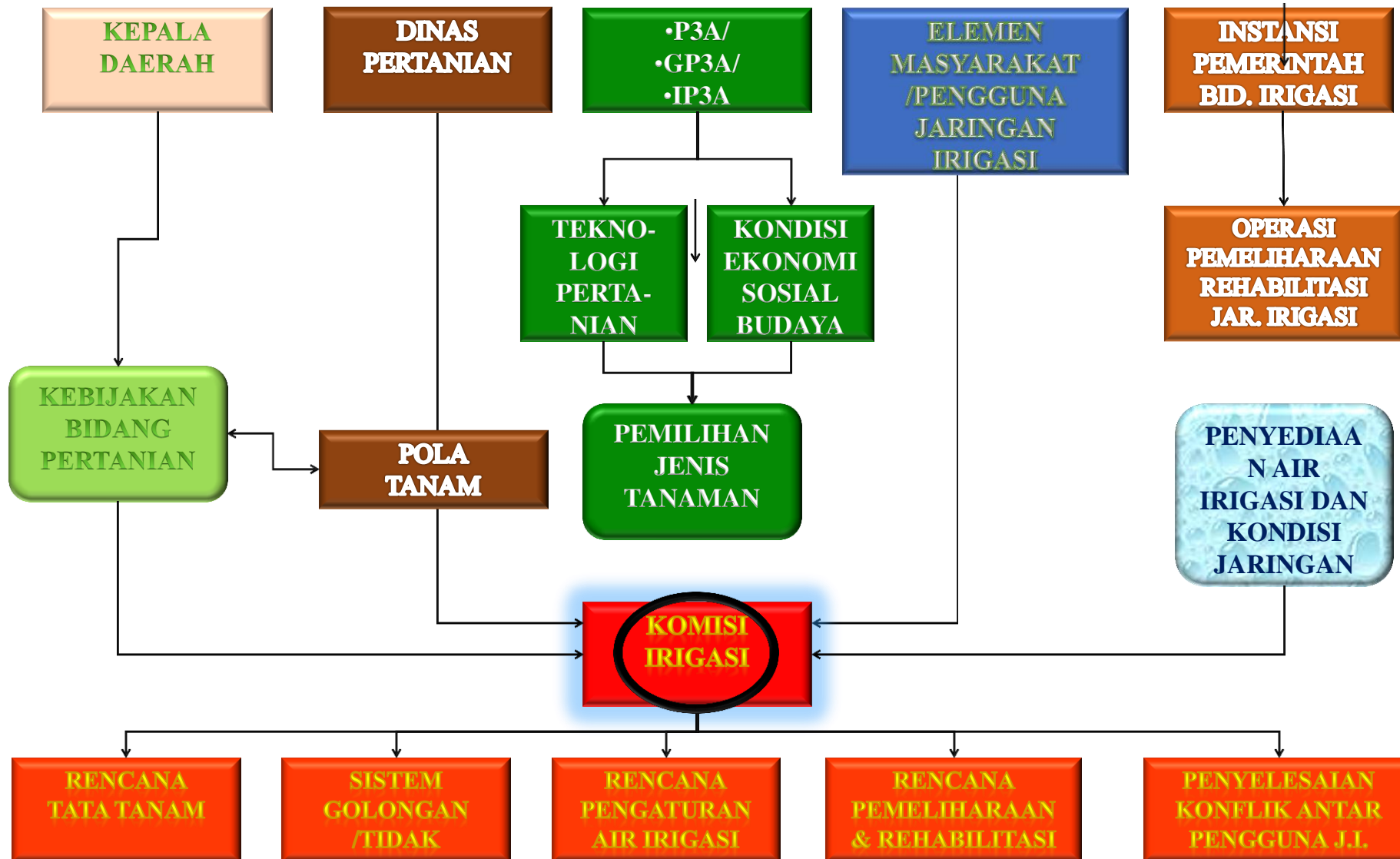
Tugas Komisi Irigasi Provinsi Membantu Tugas Gubernur (Pergub NTB 43/2016 tentang Penguatan KPI):

- a. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
- c. Merekomendasikan alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan
- d. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas/instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air serentak dan/atau mengalir, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
- f. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi;

Lanjutan

- g. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian dan alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. Memberikan masukan kepada gubernur mengenai penetapan hak guna air untuk irigasi dan hak guna air untuk irigasi pada badan usaha, badan social, maupun perseorangan;
- i. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekerinngan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
- j. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan system irigasi; dan
- l. Melaporkan kepada gubernur hasil kegiatan yang dilakukan setiap tahun.

KEDUDUKAN KOMIR DALAM TATA LAKSANA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI)



EVALUASI KINERJA

- Capaian Kerja Normatif -> Tupoksi
 - Memenuhi mandat permen dan pergub
- Capaian Kinerja Manajemen-> Pengelolaan
 - Input, Ouput, Outcome, Impact

Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi Prov. NTB 2013 - 2016

Berdasarkan hasil Penilaian Kinerja oleh
Tim Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri
Republik Indonesia

SKOR NILAI :

2012	2013	2014	2015	2016
-	58,5 (CUKUP BERFUNGSI)		92 (BERFUNGSI PENUH)	96 (BERFUNGSI PENUH)



REKOMENDASI SIDANG-SIDANG KOMIR

SIDANG I

- Implementasi UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sudah tidak relevan mengingat kondisi *ketersediaan air dan iklim* saat ini, sehingga perlu ada pengaturan melalui kebijakan (Perda, Pergub, SK) sesuai dengan kewenangan serta pengawasan (Pengamat, Juru Pintu, IP3A/GP3A/P3A) guna pemanfaatan air irigasi yang berkeadilan.

SIDANG II

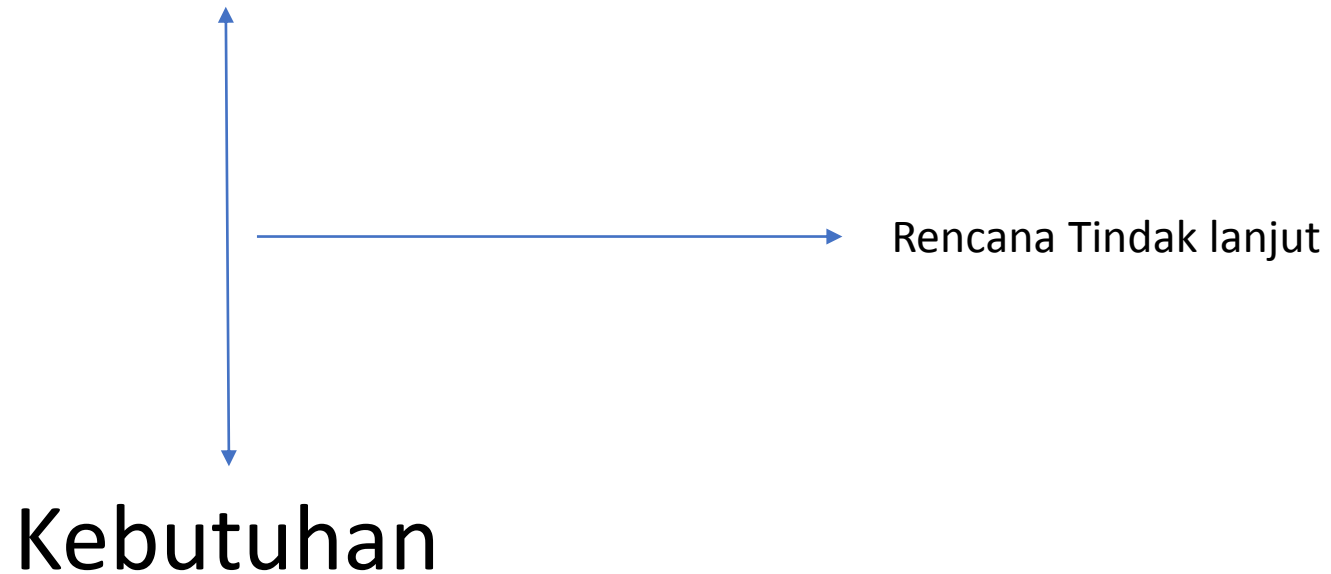
- Meningkatkan tata kelola irigasi berupa air, regulasi, penganggaran, SDM dan infrastruktur.

SIDANG III

- Ketegasan Pemerintah dalam implementasi Perda NTB No. 1 tahun 2013 tentang PLP2B (Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sangat diperlukan mengingat tingginya alih fungsi lahan yang akan menghambat terwujudnya kedaulatan pangan di Provinsi NTB.
- Perlu adanya BUMD yang fokus pada pengelolaan lahan dan produk pertanian.

Permasalahan Pengembangan

Tantangan global dan Evaluasi Kinerja



Masalah dan kendala Kelembagaan

1. Dukungan anggaran APBD masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi.
2. Peran dan kapasitas staf Sekretariat perlu ditingkatkan dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan yang telah direncanakan.
3. Pembinaan Komisi Irigasi Provinsi Ke Komisi Irigasi Kabupaten perlu ditindaklanjuti.
4. Koordinasi antar dinas terutama tiga dinas pilar Komisi Irigasi (Bappeda, Dinas PU dan Dinas Pertanian) perlu lebih optimal dalam mendukung kegiatan baik di tingkat kebijakan maupun dalam implementasi di lapangan agar dapat sinergis sebagaimana diharapkan.
5. Dukungan peralatan Kantor dan peralatan Transportasi sekretariat Komir Provinsi untuk menunjang kinerja sekretariat.

Rencana Tindak Lanjut

- Penyusunan Rencana Jangka Menengah KOMIR sebagai acuan Rencana Kerja Tahunan
- Memberikan dukungan kuat terhadap kelembagaan dengan melibatkan semua stakeholder keririgasian
- Meningkatkan partisipasi dan kapasitas anggota KOMIR
- Pengembangan integrasi teknologi komunikasi dan pemetaan (Informasi Geospasial Tematik /IGT lahan sawah beirigasi) dan data iklim untuk meningkatkan kontrol terhadap kinerja infrastruktur irigasi dan Pola Tanam
- Implementasi inovasi teknologi dalam pengelolaan air
- Mengembangkan kegiatan non-pertanian yang mendukung penambahan nilai hasil pertanian

Terima kasih